



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkhul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah
Andhika Djalul Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad
Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam
Fatkhu Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

**Deli Bunga Saravistha, Aden Sutiapermana, Hardi Fardiansyah, Andhika Djalu Sembada,
Dwi Riyanti & Rianda Usmi, Daelami Ahmad, Sumario, Evi Susilawati, Siti Fathimah,
Eva Pasaribu, Ricky Santoso Muharam, Fatkhul Muin, Vina Dini Pravita, Fitriani.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-078-4

Cetakan Pertama:

Mei, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Makna dan Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan.....	3
C. Patriotisme, Nasionalisme, Geopolitik dalam Pendidikan Kewarganegaraan	5
D. Meningkatkan Ketahanan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.....	9
E. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Bagi Intra dan Antar Generasi	11
F. Rangkuman Materi	15
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Diskursus Perkembangan Hak Asasi Manusia	21
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia	25
D. Istilah dan Definisi Hak Asasi Manusia	27
E. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia.....	28
F. Prinsip Hak Asasi Manusia	29
G. Macam-Macam HAM.....	31
H. Pelanggaran HAM.....	32
I. Landasan Hukum dan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia...	33
J. Teori Hak Asasi Manusia.....	34
K. Rangkuman Materi	35
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	39
A. Latar Belakang	40
B. Hak Warga Negara.....	41
C. Kewajiban Warga Negara	45
D. Rangkuman Materi	49
BAB 4 KESADARAN BELA NEGARA	53
A. Pendahuluan.....	54
B. Pembahasan	58

C. Bela Negara Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	59
D. Bela Negara dan Peran Media Sosial; Pencegahan Konflik dan Penanganan Potensi Konflik	61
E. Bela Negara Dalam Berbagai Cara	69
F. Rangkuman Materi	59
BAB 5 KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA	73
A. Pendahuluan	74
B. Sejarah Demokrasi	75
C. Pengertian Demokrasi	77
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	79
E. Nilai Demokrasi	82
F. Bentuk-Bentuk Demokrasi	83
G. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia	85
H. Rangkuman Materi	93
BAB 6 NEGARA DAN KONSTITUSI	99
A. Pendahuluan	100
B. Konstitusi	101
C. Negara	110
D. Rangkuman Materi	118
BAB 7 GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA	123
A. Pendahuluan	124
B. Definisi dan Kedudukan Wawasan Nusantara	125
C. Hakikat Wawasan Nusantara	128
D. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	129
E. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	133
F. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia	135
G. Study Kasus (Potret Perbatasan Tinggal di Indonesia Menggantungkan Hidup dengan Indonesia)	140
H. Rangkuman Materi	142
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	145
A. Pendahuluan	146
B. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	147
C. Landasan Hukum, Prinsip, dan Sifat Ketahanan Nasional Indonesia	149

D. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia	151
E. Ketahanan Nasional Indonesia dan Astragatra	151
F. Korelasi Antar Gatra	155
G. Ketahanan Nasional di Era Society 5.0	157
H. Rangkuman Materi	160
BAB 9 INTEGRASI NASIONAL	165
A. Pendahuluan	166
B. Pengertian Integrasi Nasional	167
C. Proses Terbentuknya Integrasi Nasional	169
D. Jenis-Jenis Integrasi Nasional	175
E. Urgensi dan Tantangan Integrasi Nasional Bagi Keberlangsungan Kesatuan Bangsa Indonesia	177
F. Rangkuman Materi	181
BAB 10 IDENTITAS NASIONAL	185
A. Pendahuluan	186
B. Pengertian dan Identitas Nasional	187
C. Faktor-Faktor Pendukung Penegakan Identitas Nasional	191
D. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Identitas Nasional	192
E. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional	196
F. Rangkuman Materi	198
BAB 11 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	203
A. Pendahuluan	204
B. Pengertian Politik	205
C. Sistem Politik	206
D. Struktur Politik	207
E. Komunikasi Politik	209
F. Budaya Politik	209
G. Strategi Nasional	211
H. Rangkuman Materi	212
BAB 12 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	215
A. Pendahuluan	216
B. Sejarah Perkembangan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia	219
C. Paradigma Pembagian Urusan Dalam Otonomi Daerah	221
D. Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	225
E. Rangkuman Materi	228

BAB 13 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Prinsip-Prinsip Pokok Good & Clean Government	234
C. Good and Clean Government Sebagai Kontrol Sosial	239
D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.....	240
E. Manfaat Adanya Good and Clean Government	241
F. Hambatan Dalam Penerapan Good and Clean Government	243
G. Rangkuman Materi	245
BAB 14 IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER	249
A. Pendahuluan.....	250
B. Rincian Pembahasan Materi.....	251
C. Identitas Nasional.....	252
D. Hakikat Identitas Nasional.....	255
E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional	256
F. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	258
G. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	259
H. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Suatu Bangsa	262
I. Identitas Nasional di Indonesia	263
J. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia	267
K. Rangkuman Materi	268
GLOSARIUM	272
PROFIL PENULIS	282



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 1: URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

BAB 1

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, itu artinya bahwa seluruh warga negaranya wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku. Untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan rule of law bukanlah pengetahuan yang bersifat anugerah yang dibawa sejak lahir melainkan harus dipelajari dan dipahami oleh masing-masing individu masyarakat secara bertahap. Negara dalam kapasitas sebagai pemerintah wajib melakukan sosialisasi akan hal tersebut ke masing-masing warga negaranya. Salah satu jalan yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui dunia pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan ini menjadi penting dalam usaha-usaha yang mengarah pada tercapainya tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Warga negara adalah salah satu unsur penting dalam upaya menyukseskan tujuan negara tersebut. Maka, untuk mengarah pada Bangsa yang beradab, masing-masing warga negaranya harus memahami patriotisme dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, peranan sangat penting memang dimainkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di dalamnya diajarkan mengenai pluralisme yakni suatu sikap yang mampu menghargai dan menerima keberagaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas (Hamid, 2013:3). Pemahaman tentang pluralisme adalah bagian dari wawasan nusantara, dimana dari

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arjoso, Amin, 2000, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Yayasan Bangsaku
- Darmadi, M.Pd., Hamid Prof., Dr., 2013, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Bandung, Alfabeta
- Efendi, A'an, Poernomo, Freddy, dan Ranuh, IG. NG Indra S., (2016), *Teori Hukum*, Sinar Grafika
- Latif, Y., 2020, *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*, Jakarta, Mizan
- Marzuki, Peter Mahmud, (2020), *Teori Hukum (The House of Law is the House of Mankind)*, Prenada Media Group
- Pruitt, Dean G., Rubin, Jeffrey Z., (2004), *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F., (2013), *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama
- Soekarno, Ir., 2012, *Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangsa: Amanat Presiden Sukarno pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara Pada Tanggal 20 Mei 1965 di Jakarta*

Lain-lain

<https://kbbi.web.id/patriotisme>

<https://www.kemhan.go.id/belanegara/2016/07/20/nasionalisme-dan-bela-negara-dalam-perspektif-ketahanan-nasional.html>

Jurnal

- Eva Nur Hidayah dan Alil Rineggo, *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkokuh Nasionalisme Untuk Kemajuan Indonesia*, Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan, Vol. 09 No. 02 (2021), <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada/article/view/273/201>
- Fakhrudin, A. M., & Dewi, D. A. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Krisis Identitas Generasi Muda. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(5). Retrieved from

<https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/223>

Rahmat Wijayanto dan J. Marzuki, 2018, Penguatan Nilai Patriotik Melalui Pendidikan Bela Negara Di SMA Negeri Titian Teras H.A.S Jambi, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 7, No. 2, Oktober 2018



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 2: HAK ASASI MANUSIA

Aden Sutiapermana, S.Pd, M.Ud

BKB Nurul Fikri

BAB 2

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hal yang seharusnya diperoleh (hak) oleh manusia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar sehingga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal (umum). Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar (basic rights) yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi, juga bersifat saling berhubungan dan saling bergantung.

Hak asasi manusia merupakan konsep khas masyarakat modern sebab masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah di rumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Cassese, A. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: IKAPI.
- Davies, P. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia*, Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hiariej, E.O.S. (2010). *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Erlangga.
- Majda, E. (2009). *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Rozali, A. (2001). *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Safroedin, B. (1997). *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar.
- Syihabuddin, L.M. (1999). *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 3: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.Ec.Dev, MA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor

BAB 3

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang memiliki nilai nasionalis patriotis dan sebagainya yang terpatri dalam setiap jiwa warga negaranya, dimana nilai tersebut semakin lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, agar terus menyatu dalam setiap warga Negara dan setiap warga Negara agar mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karena betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga di perguruan tinggi agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip utama, seperti sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini merupakan bentuk dari nama lain hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Kekakuan manusia adalah sebagai dasar yang melekat pada laki-laki sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. H. Mahpudin Noor M.Si, Suparman M.Ag., Pancasila, jln.BKR (lingkar selatan), 2016
Drs. Abdul Latief, S.Pd, M.Pd. Drs. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd.
- Drs. Herlina Ahmad, S.Pd, M.Pd., Pendidikan Kewarganegaraan, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia (Sulawesi Selatan), 2019, Cetakan Pertama.
Rivai, Veithzal. 2006. MSDM untuk perusahaan dari teori ke praktek, Jakarta :Raja Grafindo Persada



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 4: KESADARAN BELA NEGARA

Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 4

KESADARAN BELA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Kesadaran bela negara merupakan bagian penting dalam kebijakan nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi banyak sekali ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui usaha panjang dan penuh pengorbanan, tidak bisa begitu saja dilepaskan dari kontribusi dan sumbangsih yang diberikan oleh seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengupayakan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional, guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan harapan bangsa Indonesia yang seutuhnya, diharapkan suatu kebijakan nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan yang strategis, baik dalam tataran global, regional, juga nasional.

Setiap negara perlu mempunyai kebijakan strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tidak hanya dapat memiliki pengaruh positif berupa peluang, tetapi juga bisa berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang nantinya memiliki potensi menjadi sebuah konflik bagi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Achmad, Lc., M.A. (2021). Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah/Sekolah. Bandung. Media Sains Indonesia
- Ichsan Malik. (2017). Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Karasawa, Minoru. (2002). Patriotism, Nationalism and Internationalism among Japanese Citizens: An Etic-Emic Approach. Political Psychology, vol.23, no.4. 645-666
- Kartono, S.Pd dan Susi Dyah Ftmawati. (2009). Partisipasi Bela Negara. Semarang. Alprin
- Suhirwan dan kunto wibowo AP. (2020). Semangat Bela Negara Dalam Pembangunan Nasional. Makassar.Nas Media Pustaka



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 5: KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Dwi Riyanti, S. Pd., M. Pd.¹
Rianda Usmi, S. Pd., M. Pd.²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka

BAB 5

KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Beberapa abad lamanya manusia hidup hanya sebagai hamba sahaya yang tidak memiliki nilai. Sekarang ini sejak ribuan tahun semenjak ide-ide awal mengenai pemerintahan dan kehidupan sosial muncul, manusia sudah mempunyai satu konsep pemerintahan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual atau biasa disebut dengan makhluk mono pluralis. Sifat individual manusia bergerak untuk mengutamakan kepentingan individu, sedangkan sifat sosial akan menimbulkan kebutuhan manusia untuk berkumpul dengan manusia atau individu lainnya. Konsep pemerintahan yang dianggap cocok untuk sifat manusia tersebut adalah demokrasi.

Demokrasi merupakan sistem yang tidak mempunyai dimensi yang tunggal namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi. Dalam melaksanakan demokrasi harus juga diiringi dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Implementasi pelaksanaan demokrasi yang memposisikan rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara sering kali mengalami pergeseran ketika peran negara berusaha untuk membatasi kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Menggunakan gerakan konstitusional maupun yuridis formal digunakan untuk membatasi ruang dalam melakukan demokrasi. Hal ini juga dibuktikan dengan sejarah Indonesia dalam perjalanannya mengimplementasikan demokrasi yang tidak selalu sesuai dengan konstitusi. Fakta di dalam sejarah menjelaskan

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Adnan Buyung. (2010). *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas.
- Ghfar, Affan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassiouni, Cherif. (1998). *Reining In Impunity For International Crimes And Serious Violations Of Fundamental Human Rights: Proceedings Of The Siracusa Conference*.
- Hobson, Christopher. (2015). *The Rise of Democracy Revolution, War and Transformations in International Politics Since 1776*. Skotlandia: Edinburgh University Press.
- Supardan, Dadang. (2015). *Sejarah dan Prospek Demokrasi*. Sosio Didaktika, Vol. 2, (2), 125-135.
- Sulisworo, Dwi. (2012). *Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan
- Kasih, Eka Wahyu. (2018). *Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. JKLRI, Vol. 6, (2), 49-68.
- Purnamawati, Evi. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. Solusi, Vol. 2, (2), 251-264.
- Asshiddiqie, Jlmly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kurt A. Raaflaub and Robert W. Wallace. (2007). *Origins of Democracy in Ancient Greece*. Los Angeles: University of California Press.
- Lasiyo, Dkk. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press.

- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press, New Haven.
- Safriadi. (2017). Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UIR Law Review*, Vol. 1 (1), 25-38.
- Huntington, Samuel P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. United States: [Simon & Schuster](#).
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNYPress.
- Sunarso, Dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNYPress.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 6: NEGARA DAN KONSTITUSI

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

BAB 6

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

Konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan faktor fundamental yang menentukan arah dan tujuan suatu negara. Hampir setiap negara di dunia ini memiliki konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang biasa disebut dengan undang-undang dasar atau konvensi. Kalaupun ada suatu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, misalnya Inggris dan Kanada, mereka merumuskan tujuan bernegara masyarakatnya dengan mendasarkan pada Piagam Fragmentaris, yang memuat norma-norma yang layak dan berkedudukan sebagai norma konstitusi, misalnya Magna Charta Libertatum (1215), The Habies Corps Act (1670), The Bill of Rights (1689), dan lain-lain..

Konstitusi merupakan sebuah kerangka kerja (kerangka kerja) dari suatu negara. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisasikan dan dijalankan. Tidak ada satu negara pun di dunia sekarang yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan kata lain, negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Jika tidak ada konstitusi maka negara tidak mungkin ada. Pemerintah sebagai representasi dari negara tidak akan bisa menjalankan kekuasaan jika tidak ada konstitusi. Demikian pula, konstitusi juga tidak akan pernah ada tanpa adanya negara. Kelahiran sebuah konstitusi merupakan kehendak rakyat. Oleh karenanya, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kepemilikan negara. Dengan demikian, konstitusi dapat digambarkan sebagai suatu sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (1991). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chaidir, Ellydar. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Daman, Razikin. (1993). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fadjar, Abdul Mukthie. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Haryanti, Dewi. (2014). Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2 (1), Oktober 2014: 214-225.
- Junaidi, Muhammad. (2016). *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kelsen, Hans. (2011). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cet. Keenam. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. (2002). *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1984). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1993). *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pangaribuan, Piatur., Purnomosidi, Arie. (2012). *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*. Surakarta: Cakrawala Media.
- Parthiana, Wayan. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono . (1974). *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Ranawijaya, Usep. (1982). Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Strong, C. F. (2010). Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk), Bandung: Nusa Media.
- Suantra, I Nengah, Nurmawati, Made. (2017). Ilmu Negara. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syafriadi. (2019). Hubungan Negara dan Konstitusi dalam Paham Konstitusionalisme. Jurnal UIR Law Review, 3 (2), Oktober 2019: 22-33.
- Thaib, Dahlan dkk. (2008). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahjono, Padmo. (1982). Negara Republik Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wheare, K.C. (1975). Modern Constitution. London: Oxford University Press.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 7: GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA

Sumario, S.Pd

SMA-IT Al-Ghofar

BAB 7

GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA

A. PENDAHULUAN

Cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. Namun tidak setiap bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi *"Brittain rulles the waves"*. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Sedangkan bangsa Indonesia memiliki waawasan nasional yaitu wawasan nusantara.

Apakah wawasan nusantara itu? Secara konsepsional wawasan nusantara (wasatra) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa indonesia yang selanjutnya disebut. Wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan republik Indonesia.

Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh . wawasan nusantara sebagai wawasan nasional nya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya menghasilkan komponen wawasan nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geo politik bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. A. (2017). *Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Di Indonesia*. Denpasar: Universitas Udayana .
- Habib, H. (1970). *Wawasan Nusantara dan hubungannya dalam ketahanan nasional dalam bunga Rampai Ketahanan Sosial oleh Himpunan Lemhanas* . Jakarta: PT Ripres Utama.
- Haryomataram. (1974). *Mengenal Tiga wajah Ketahanan Nasional Dalam bunga Rampai Ketahanan Nasional* . Jakarta : PT Ripres Utama .
- <https://.Blogspot.com>. (2006, Juli Senin). 2. *Geopoliti dan Geostrategi Vol.1*, pp. 50 -51.
- Ikakhofie.[Blogspot.com](https://.Blogspot.com). (2014). *Pengertian Geopolitik dan Geostrategi* . Jakarta : Ikakhofie .
- Kantaprawira. (2004). *Sistem Politik Indonesia* . Bandung : Sinar Baru Algesindo .
- Rusli, K. (1986). *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan* . jakarta : Yayasan Hatta .
- Sapriya. (2012). *Memperkokoh posisi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Disipilin Ilmu Terintergrasi*. Bandung : FPISP ,UPI Bandung .
- Surbakti, K. (2018). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN Siswa Dengan Menggunakan Metode TALKING STICK materi sistem pemerintahan pusat. *Jurnal Tematik* , 166-171.
- Winarno. (2020). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan* . Jakarta: Bumi Aksara.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 8: KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Dr. Evi Susilawati,M.Pd

Prodi PPKn FKIP Universitas Islam Sumatera Utara

BAB 8

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pada Era Society 5.0 seperti sekarang ini, setiap bangsa di dunia dihadapkan pada berbagai permasalahan kehidupan seperti permasalahan sumber daya alam, permasalahan keamanan lingkungan, ketahanan air dan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, hingga ketahanan militer dan masalah keamanan masyarakat. Kesemuanya itu merupakan bahagian dari Ketahanan Nasional.

Berbicara mengenai ketahanan nasional, Ketahanan Nasional Indonesia merupakan bahagian yang penting dari keamanan warga dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terletak antara dua samudera dan dua benua dengan posisi geografis yang unik. Posisi unik ini menempatkan Indonesia sebagai pusat di antara sepuluh negara tetangga laut dan perbatasan darat. Disamping itu, laut teritorial Indonesia menempati posisi penting bagi perdagangan internasional. Posisi geografis tersebut, mengakibatkan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan.

Sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim, Indonesia sangat tertarik dalam menciptakan keamanan di kawasan dunia, termasuk keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia. Oleh karenanya, penting mempertahankan keamanan nasional Indonesia. Pertahanan keamanan nasional Indonesia dikelola dalam suatu sistem pertahanan yang utuh untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan keamanan nasional Indonesia pada dasarnya melibatkan semua warga

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi., Bandono, Adi., & Safrudin, Nur., 2017. Dampak Teknologi Informasi Terhadap Ketahanan Nasional Masyarakat di Kabupaten Bangkalan: Sebuah Pendekatan Model Sistem. *Astro Jurnal-STTAL*. Vol 8. Juli-Desember.
- Astri, Susanti., 2016. Dasar Hukum Ketahanan Nasional. Makalah Seminar STEKOM Welari Kendal. Jawa Tengah
- Anom, Erman., 2008., Pemahaman Ketahanan Nasional Dalam Upaya Memperkokoh Keutuhan NKRI. *Forum Ilmiah Indonusa*. Vol 5. No 3.
- Muladi. (2015). Wawasan Kebangsaan: Pengertian, Makna, Nilai. <http://demokrasipancasilai..>
- Taufik, Marga., (2013). Peningkatan Pencegahan Radikalisme Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Kertas Karya Perorangan Program Pendidikan Reguler Angkatan I*, Lembaga Ketahanan Nasional.
- Perpustakaan Lemhanas RI, (2022). Ketahanan Nasional. Dikases dari: <http://lib.lemhannas.go.id/> pada tanggal 13 Maret 2022.
- Suharyono dan Amien Moch., 2013., Pengantar Filsafat Geografi. Penerbit : Ombak. Yogyakarta.
- Vaughn, Bruce. 2011. "Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and U.S. Interests". Congressional Research Service.
- Wingarta, Putu Sastra., (2016). Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika (Pendekatan Kewaspadaan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas*, Edisi 26.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 9: INTEGRASI NASIONAL

Siti Fathimah, S.Pd., M.Pd

Universitas Negeri Manado

BAB 9

INTEGRASI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sosial budaya. Sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang plural atau majemuk. Tentunya keberagaman ini, harus kita terima sebagai kekayaan bangsa. Namun di sisi lain di dalam keberagaman dan pluralitas suku, bahasa, adat istiadat dan agama juga dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan yang jika hal ini berlangsung secara berkepanjangan maka akan menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok, antar etnis, antar agama dan antar wilayah, hingga berdampak juga dengan munculnya paham separatis dan mengancam keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama para generasi penerus bangsa dalam memperkokoh dan mempererat integrasi nasional bangsa. Namun asumsi ini bukan berarti akan meniadakan konflik sosial sebagai salah satu dari wujud gejala sosial secara alamiah, akan tetapi bagaimana agar asosiasi negara mampu mewadahi berbagai perbedaan antar-unsur pembentuk bangsa dalam suatu kesatuan wadah negara.

Dengan demikian, permasalahan integrasi merupakan permasalahan kompleks yang pasti dialami oleh berbagai negara. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII, PRRI atau munculnya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang diawali dengan adanya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pusat,

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Aco Agus. (2016). Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 3(1963), 19–27.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2016). *KBBI Daring*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Damri, D., & Putra, F. E. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan.pdf* (p. 181). <http://repository.unp.ac.id/28637/1/DAMRI> PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2020.pdf
- Ismail, & Hartati, S. (2020). *Pendiidkan Kewarganegaraan; Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Juliardi, B. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, Y., & Collin, M. (1995). *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Gajah Mada Universitas Press.
- Riyanto, J. (2017). Kewaspadaan Nasional , Bela Negara dan Integrasi Nasional. *Majalah Wira, Puskom Publik Kemhan*, 67(51), 1–82. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/09/wiraJuli-Agustus2017.pdf>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes & Noble Books.
- Usman, S. (1998). *Integrasi Masyarakat Indonesia dan Masalah Ketahanan Nasional; dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 10: IDENTITAS NASIONAL

Eva Pasaribu, S.Pd., M.Pd

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

BAB 10

IDENTITAS NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, yang membawa kita ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di Era Globalisasi, eksistensi identitas nasional kembali mendapat perhatian penting di berbagai negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pendidikan kewarganegaraan.

Pada suatu negara terdiri dari beberapa kelompok atau suku bangsa. Di berbagai negara memiliki perbedaan, baik dari perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, budaya, dll. Tentunya orang asing memiliki perbedaan dengan kita, jika perbedaan itu adalah persamaan dari kelompoknya/bangsanya, maka itulah yang dimaksud dengan identitas nasional. Identitas dapat dipahami, ciri dari individu, atau kelompok yang dapat membedakan dengan individu atau kelompok lainnya. Walaupun demikian sebagai sebuah negara akan membentuk ciri atau tanda dari negara tersebut. Secara politis artinya identitas tersebut dirancang, di sepakati dan disahkan oleh lembaga negara sebagai identitas nasional, sedangkan secara sosiologis artinya identitas itu tumbuh dan berkembang secara alami tanpa ada intervensi dari penguasa atau pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2014. Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013. Bandung. PT. Regika Aditama.
- Bakry, Noor. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamim,A.I.dkk. 2003. Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Ditlitbang Muhhamadiyah dan LP3 UMY.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Ganeswara,G.M,dkk.2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung:UPI Press.
- H. Nursid Sumaatmadja,K.W. 2010. Perspektif Global. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ismaun. 2000. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Bandung: Karya Remaja.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kaelan, MS. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Penerbit Paradigma.
- Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:Djambatan.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Winarno, D. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Bumi Aksara.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI Tentang Agama, Pasal 29.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI Agama, Pasal 29 Ayat 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A
Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III
Tentang Kekuasaan Pemerintah, Pasal 9 Ayat 1



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 11: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.

MKWU PPKn Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 11

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pentingnya memahami politik dan strategi nasional dalam sistem ketatanegaraan akan memberikan gambaran terhadap apa itu politik, sistem politik serta politik strategi nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik menjadi salah satu hal kajian ilmu yang perlu dipelajari khususnya dalam mengambil suatu kebijakan, pemindahan kekuasaan, atau bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan.

Aristoteles pernah menjabarkan bahwa politik adalah *master of science*. Di mana ilmu tentang politik sebagai kunci untuk dapat mengenal serta memahami lingkungan (Surbakti,1992). Selain itu, Rafael Raga Maran mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk politik dimana keberadaannya dalam menjalankan kehidupan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan (Maran,2007). Tidak sedikit yang berpandangan bahwa politik selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan berpemerintahan. Sedangkan pengertian tentang ilmu politik dijabarkan oleh Ossip K. Flechteim dalam bukunya yang berjudul *Fundamental of Political Science*: ilmu politik merupakan ilmu sosial khusus yang mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi dan dapat mempengaruhi negara (Budiardjo,2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (pp. 1–319). CV Pustaka Setia.
- Assauri, S. (2018). *Strategic Management*. PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, K. (2016). *Studi Komunikasi Politik*. Universitas Malikussaleh.
- Jamaludin, U., Damanhuri, Setiawan, D., & Raharjo. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat (BKS-PTN BARAT).
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Rineka Cipta.
- Mochtar Mas'ood, & MacAndrews, C. (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. UGM Press.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi Politikus dan Negarawan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Toha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik* (PT RajaGra).



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 12: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M

Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

BAB 12

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada hakikatnya sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu keberadaan otonomi daerah mendorong kemandirian pada setiap daerah untuk mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah perkembangan di Indonesia, keberadaan otonomi daerah tidak hanya pada fase reformasi, tetapi gagasan otonomi daerah tertuang dalam konstitusi asli Indonesia (UUD 1945 sebelum amandemen), di mana tergambar bahwa susunan-susunan pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara unitaris yang terdesentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan dasar konstitusional bahwa Indonesia adalah negara unitaris yang terdesentralisasi. Pada tataran konstitusi, mungkin sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk

DAFTAR PUSATAKA

- Isharyanto, ***Politik Hukum Model Pembagian Kewenangan Dalam Rangka Desentralisasi Di Indonesia (Orde Baru – Sekarang)***, Halaman Moeka Publishing Cetakan 1, Agustus 2016.
- Obsatar Sinaga, ***Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Impelementasi Kerjasama Internasional***, Penerbit LEPSINDO, 2010.
- Sri Kusriyah, ***Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia***, UNISSULA PRESS, 2019.
- Baginda Harahap, ***Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kepentingan Nasional Dan Kepentingan Daerah (Ic. Kasus Batam Sebagai Model)***, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 32, No. 4 Tahun 2002.
- Roni Ekha Putra, ***Hubungan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Nagari dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanahdatar***, Jurnal Administrasi Negara, Vol 9 No. 1, Januari 2009.
- Edward H, ***Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah***, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol XLII No. 1, Tahun 2016.
- Republik Indonesia, UU Republik Indoensia No. 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Rivelino, ***Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah***, Jurnal Inspirasi Volume 8 No. 1 Maret 2017.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 13: GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

STIPRAM Yogyakarta

BAB 13

GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

A. PENDAHULUAN

Globalisasi yang berkembang begitu pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya menyentuh bidang pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perencanaan terhadap perubahan. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan adalah mengubah tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ke status yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, masyarakat akan cenderung menolak terhadap perubahan tersebut. Namun seringkali, penolakan yang dilakukan berdasarkan pada alasan yang hanya dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Hal itu merupakan sebuah tantangan yang kemudian harus ditemukan jalan keluarnya dengan menciptakan pemerintahan yang dirasa lebih bagus dan lebih bersih dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan tersebut.

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”, yang berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.

Menurut Ubaidillah (2000) istilah government dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Good

DAFTAR PUSTAKA

- Frank, Andre Gunder. 1984. [Sosiologi pembangunan dan keterbelakangan sosiologi](#). Pustaka Pulsar. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Supeno, Hadi. 2009. *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Total Media. Yogyakarta.
- Sugeng, Y 2016. *Peran Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang baik, Good Governance*. Materi Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana S1 STISIP Kartika Bangsa yang tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Syah, Muhibbin. 1995. *Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru*. Rosda Karya. Bandung.
- Ubaidillah. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press. Jakarta.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 14: IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si

Universitas Musamus

BAB 14

IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

A. PENDAHULUAN

Identitas Nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu Bangsa dan Negara, Selain itu pembentukan Identitas Nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah di sepakati bersama. Menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu Bangsa dan Negara sudah tidak perlu di tanyakan lagi, Terutama di dalam bidang Hukum. Siapapun orang mengerti serta paham Aturan – Aturan yang ada di suatu Negaranya, Tetapi tidak sedikit orang yang acuh dan tidak peduli seolah-olah tidak mempermasalahkan kekeliruan yang terjadi di Negaranya, Dan yang paling memprihatinkan seolah-olah masyarakat membiarkan dan bisa dikatakan mendukung, Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dan dilihat dari sikap dan tanggapan masyarakat dari kekeliruan di bidang hukum di dalam Negara tercinta ini. Maka dari itu Identitas Nasional sangatlah penting untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Agar Masyarakat di Negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan Negara tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukanlah orang lain tetapi kita sendiri sebagai masyarakat yang ada di Negara dan Bangsa ini yang dapat mengubah segala kekeliruan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Castell, M. (2011). *The power of identity: the information age: economy, society, and culture*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Darmaputra, Eka. (1988). *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesia Society*. Leiden: E.J. Brill.
- Herdianto, H., & J. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara*. Jakarta: Erlangga.
- I Wayan Latra. (2017). *Identitas Sebagai Salah satu Determinan Pembangunan dan Karakter Bangsa*. UPT Pendidikan Karakter Bangsa. Universitas Udayana.
- Kaelan. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Rahman, A., & Madiong, B. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Rahayu, Ani Sri.(2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarinah., D, Muhtar., & H. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di perguruan tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Schnabel, A., & Hjerm, M. (2014). *How the Religious Cleavages of Civil Society Shape National Identity*, Sage Open,1-14.
- Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta Sinar: Grafika.
- Widodo,Wahyu, Budi Anwari dan Maryanto. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Pengantar Teori*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yeyen Sormin, Yayang Furi F, Dinie Anggraeni D. (2021). *Identitas Sebagai Salahsatu Determinan Pembangunan dan Karakter Bangsa*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 5 Nomor 3. Universitas Pahlawan.

PROFIL PENULIS

Deli Bunga Saravistha, SH., MH.



Penulis wanita kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi s1 dan s2 nya di Universitas Udayana. Dan kini kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Almamater-nya tercinta. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, dimana kampus ini merupakan kampus yang Sukarno is dan merupakan kampus tertua di Bali, Penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Kini Penulis menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Perempuan dan Anak di Kampus Marhaen ini. Sejak pengabdian nya telah diundang menjadi Narasumber di berbagai Seminar Nasional baik di lingkungan Universitas, antar Universitas, dan berbagai organisasi baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi, khususnya berbicara mengenai topik-topik kaum perempuan. Selain itu, di Tahun 2021 sejak September lalu, dipercaya juga untuk menjabat sebagai *Vice Programme Director* di The People's Law Center yang berada di bawah naungan Yayasan Duta Bina Bhuna yang berdiri sejak 1997. Penulis juga aktif diundang sebagai Narasumber ataupun Penanggap di FGD Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Narasumber dalam Rangkaian Seminar Nasional Kominfo dalam rangka kegiatan literasi digital. Meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang salah satunya diberikan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilombakan di seluruh Indonesia.

Email : delisaravistha@gmail.com

Aden Sutiapermana, S.Pd, M.Ud



Penulis dilahirkan di kota Serang Provinsi Banten pada 8 Desember 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Magister Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Filsafat Islam di Universitas Paramadina, dan kini sedang menyelesaikan S3 pada program studi Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah menjadi dosen pada Institut Agama Islam Banten dan

pengajar Sejarah dan Sosiologi pada BKB Nurul Fikri. Selain juga sebagai Tutor TWK dan TKP AKSES Education Center.

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.Ec.Dev., MA



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, Manajemen SDM, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multi disiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis yang merupakan Lulusan Program Doctor of Philosophy (Ph.D) Jurusan Business Law di salah satu Universitas Terkemuka di Malaysia juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil.



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 10 Juli 1986. Lulus sekolah menengah atas tahun 2004, kemudian melanjutkan kuliah D3 Bahasa Korea serta ekstensi S1 Bahasa Korea di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005 mendapat kesempatan mengikuti program belajar Bahasa Korea (Global Hanma 2005) yang diselenggarakan oleh Kyungnam University, di Kota Masan, Korea Selatan. Setelah lulus S1 kemudian melanjutkan studi dengan menempuh program S2 Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Semasa sekolah dan kuliah aktif dalam kegiatan sosial, musik, dan olahraga. Saat ini aktif mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta, Stikes Yogyakarta, Akademi Pariwisata Yogyakarta, dan mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing di Pusat Studi Sosial

Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, kegiatan yang lainnya yaitu sebagai staf pelatih sepakbola di PSS Sleman Development Center. Karya tulis yang sudah dihasilkan adalah beberapa jurnal nasional, buku soal-soal Ujian Nasional, buku referensi, serta terjemahan bebas di media sosial. Apabila ingin berkomunikasi dengan penulis, dapat melalui email ke andhikadjalu@stipram.ac.id atau melalui Instagram dengan nama akun andhika djalu sembada.

Dwi Riyanti, S.Pd., M. Pd.



Penulis lahir pada 4 Januari merupakan dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Pusat. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dwi juga pernah mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini

Dwi juga sebagai editor Unnes *Political Science Journal* dan Editor *Journal of Education and Technology*, serta sebagai reviewer Jurnal Pancasila dan Bela Negara. Penelitian yang sedang dilakukan antara lain: sebagai Ketua Tim Peneliti “Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Bantul”, Ketua Tim Peneliti “Pengelolaan Pasar Tradisional Menggunakan Asas Kekeluargaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Ketua Tim Peneliti “Pengembangan Klinik Bimbingan Akademik dan TAP Mahasiswa Berbasis Online”, serta sebagai anggota penelitian “Penerapan Model Tutorial Online untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Mahasiswa”, “Etika Orang Jawa Dalam Menghadapi Musibah (Studi Kasus: Bencana Lahar Gunung Semeru)”, “Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal Untuk Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila”, dan “Perspektif *Mathematical Power* dalam Implementasi Pendidikan Karakter”.

Rianda Usmi, S. Pd., M.Pd



Penulis lahir di Danau Sati Riau, 16 Oktober merupakan Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta merupakan *The Best Graduate Student in Master Degree* tahun 2021. Penulis merupakan Dosen Luar Biasa dari Universitas Tidar. Pengalaman berorganisasinya sangat banyak dan pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa PPKn Se-Indonesia 2016-2018, Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial 2017, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016. Saat ini ia juga sebagai *reviewer Unnes Political Science Journal* dan *reviewer Journal of Education and Technology*. Penulis juga aktif terlibat dalam penelitian Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Bantul dan penelitian tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Menggunakan Asas Kekeluargaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rianda tercatat sebagai mahasiswa S3 Universitas Pendidikan Indonesia dan mengambil Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan mulai tahun 2022.

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si



Penulis lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 1974. Tinggal di Kota Serang Provinsi Banten. Lulus S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan Lulus S2 Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta pada tahun 2011. Lulus Suscadoswar (Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2000. Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, mengampu MK Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Kewirausahaan, Manajemen SDM, Kebijakan Publik, Etika Administrasi, Kepemimpinan, dan Personality Development. Beliau Pernah menjabat sebagai pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten (2003-2011), Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia (2013-2016), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro (2016-2021),

LKP Ichsan Medical Centre (2016-2021), dan Lembaga Sertifikasi Profesi Caregiver (2017-2021). Aktif sebagai pengurus di organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Banten, dan APPERTI (Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi) Banten.

Sumario, S.Pd



Penulis lahir di bandung 02 maret 1991 dan sekarang menetap di kota bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Griha 23 kota bandung pada tahun 2003. dan melanjutkan pendidikan di SMP PASUNDAN 2 KOTA BANDUNG lulus pada tahun 2006 dan SMA PASUNDAN 8 KOTA BANDUNG sampai pada tahun 2009. Setelah itu ia tempuh selanjut nya pendidikan starata 1 prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kampus STKIP BANTEN. Hingga lulus pada tahun 2015 lalu di tahun 2015 sampai tahun 2017 ia kembali melanjutkan study starata 1 nya kembali di prodi manajemen sumber daya manusia di kampus STIE BINA BANGSA. Terpanggil dari rasa ingin tahu nya. pria yang sering disapa Mario ini selain aktif sebagai tenaga pengajar di berbagai institusi pendidikan khusus nya di kota bandung. Mario pun sangat memiliki hobi menulis. Dari hobi nya tersebut di beberapa termin waktu yang lalu ia pernah menjadi juara 1 lomba essay kepramukaan yang dilaksanakan di unila lampung selain itu banyak juga beberapa journal yang telah ia publish. Selain hobi sebagai penulis pria yang biasa dipanggil dengan sebutan sumario ini dia pun berprofesi pula di bidang pendidikan, aktivitas mengajar nya dia mulai dari tahun 2013 berawal dari kiprah nya di kota serang, dan pada tahun 2017 ia memulai karier nya kembali di dunia pendidikan dengan mengajar di SMA PASUNDAN 5, dan SMPIT AL-GHOFAR sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tak hanya itu beliau pun sangat aktif di berbagai bidang traning dari mulai, public speaking, motivator, dan author. Sampai dengan saat ini. Motto yang selalu beliau hadirkan dalam perjuangan nya itu adalah.....” ***jadikanlah hambatan itu sebagai vitamin di dalam diri kita***”

Dr. Evi Susilawati, M.Pd



Penulis memulai karirnya dalam bidang Teknologi Pendidikan di pendidikan tinggi sejak tahun 2009. Jabatan dalam pekerjaan dimulai pada tahun 2009-2015 sebagai Wakil Dekan I Universitas Tjut nyak Dhien tahun 2009-2015. Ketua STKIP Asy Syafiiyah tahun 2015-2018 dan saat ini penulis bertugas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univesritas Islam Sumatera Utara (UISU).

Siti Fathimah, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Kota Jantho, 27 Mei 1991. Beliau merupakan anak kedua dari Ayahanda Yusriman Lubis dan Ibunda Asmida. Beliau menempuh S1 Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Padang dari tahun 2019-2013, lulus S2 di Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Pasca sarjana Universitas Negeri Padang dari tahun 2016-2018. Saat ini beliau adalah seorang dosen di Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah buku ajar Pemberdayaan Masyarakat Desa dan buku ajar Modal Sosial, serta beberapa buku chapter seperti Buku Pembelajaran Daring dalam Dunia Kampus, Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya. Adapun karya-karya tulisan lainnya dapat di lihat di google scholar diantaranya Google Docs Sebagai Solusi Pengerjaan Tugas Kelompok dalam Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid 19, Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah), Mapping Factors Supporting Social Integration of the Minangkabau Community in Luhak Tanah Datar, Social Solidarity of Luhak Community Lima Puluh Kota, Memahami Kearifan Lokal Masyarakat Minahasa, sebagai Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat dan lain sebagainya.

Eva Pasaribu, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Pokan Baru 28 Agustus 1992, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Merupakan anak ke-2 dari 7 bersaudara. Menikah dengan Pdt. Henriko Sihotang, M.Th. Menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 091524 PNP Tonduhan (2004), SMP Negeri 1 Tanah Jawa (2007), SMA Negeri 1 Tanah Jawa (2010), Pendidikan Strata-1 ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan (2014). Pada tahun 2017 menyelesaikan Program Magister di Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan. Saat ini menjadi Dosen tetap di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sekolah dasar dan pendidikan kewarganegaraan. Diluar aktivitasnya mengajar penulis juga merupakan istri dari Pendeta dan sangat menikmati perannya menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.



Penulis kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibusah, SMK N 1 Cibusah, SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG) Yogyakarta, dan kini aktif mengajar di Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap

di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku antologi yang berjudul “Romansa di Penjara Suci”, Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dan ini merupakan buku ketiga penulis. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M



Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 28 November 1983, pendidikan Sarjana diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (2002-2006), Strata dua/S2 diselesaikan pada Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan menempuh strata tiga/S3 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dipercaya sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu pernah mengajar di beberapa kampus lain, seperti di STIE/STMIK Insan Pembangunan, Fak. Hukum Universitas Islam Sykh Yusuf Tangerang dan STIH Painan Banten. Penulis juga melakukan publikasi baik pada jurnal Internasional dan juga Nasional, dengan telah mendapatkan Scopus Author ID 57210388068. Selain itu karya ilmiah penulis dalam bentuk buku, book chapter dan prosiding. Penulis Pernah menduduki jabatan akademik sebagai Kepala Laboratorium Fak. Hukum Untirta (2011-2012), Sekretaris Bidang Hukum Tata Negara Untirta (2012- 2014, Anggota Senat Fakultas Hukum Untirta (2017-2019, Ketua Komisi Hukum, Etika dan Tata Kelola dan SDM Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2020-2024). Pada organisasi profesi pernah menjadi Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Serang (2012-2015). Adapun dalam bidang organisasi menjabat sebagai Ketua Wilayah Provinsi Banten Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (Masika ICMI) Masa Bakti 2020-2024.

Vina Dini Pravita, S.S, M.Si, CHE



Penulis lahir di Magelang pada 08 Maret 1985. Mengenyam pendidikan S1 Prodi Arkeologi, Universitas Gadjah Mada dan S2 di STPMD “APMD” Yogyakarta pada Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini tinggal di Yogyakarta dan aktif sebagai dosen di STIPRAM Yogyakarta pada Jurusan Pariwisata, serta aktif menulis pada bidang pariwisata, sosial, politik, dan pemerintahan. Penulis dapat dihubungi pada alamat email vinadinipravita@stipram.ac.id

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si



Penulis Lahir di Jayapura-Papua pada tanggal 31 Agustus 1978 yang merupakan anak pertama dari Prof.Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., M.Si. dan Ibu Irawati. Penulis memiliki suami bernama Fajar Arfid Suhendra yang sedang bertugas di Kantor BASARNAS Merauke, dan memiliki 2 orang anak yaitu Sydney Anthoanette Farah R dan Ramaditya Jingga Dinata. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Informatika di STIMIK-LIKMI Bandung, pendidikan S2 Administrasi Pemerintahan Daerah di MAPD-STPDN Jatinangor dan pendidikan S3 Administrasi Publik di UNHAS Makassar. Pengalaman kerja penulis bermula dari Internal Control di PT.Pharos Indonesia Jakarta Selatan, Pelatih dan Staf di STPDN Jatinangor, Staf di Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Kepala Sub Bagian Pelayanan Data Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Dosen Teknik Informatika di STTM Merauke, Kepala Program Studi Sistem Informasi UNIMER, Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Program Studi Administrasi Publik (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu penulis juga aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, yaitu Bendahara Komunitas KANDARA Forografer Merauke, Anggota IAPA (Indonesian Association for Public Administration) Jakarta, Asesor BAN-PT

RI, Pengurus PHRI Merauke, Pengurus IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) Papua, Anggota Forum Komunikasi Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Republik Indonesia, Pengurus IKA UNHAS Papua dan Sekretaris KSPSI Cabang kabupaten Merauke. Pengalaman sebagai narasumber baik Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional, dan memiliki artikel ilmiah sebanyak 39 jurnal baik Nasional, Internasional dan terindeks Scopus, menerbitkan 2 buku, serta sudah memiliki 3 produk Haki.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.